

ABSTRAK

Bahasa dapat memberikan makna yang salah jika pengertian yang tidak jelas, tidak dapat dibatasi penggunaannya, terutama yang sering terjadi antara penguasa dengan masyarakatnya. Dalam praktik politik pada pemerintahan, nilai-nilai filosofis Pancasila yang ada dipandang belum cukup untuk memiliki indeks penilaian untuk diimplementasikan dalam operasionalisasi aturan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, di mana interpretasi nilai-nilai Pancasila itu selalu berbeda. Akibatnya, Pancasila selalu kehilangan nilai – nilai esensinya, karena setiap rezim pemerintahan selalu membangun wacana sendiri tentang esensi makna Pancasila, yang disesuaikan dengan kepentingan politiknya.

Distorsi bahasa seringkali menjadi hambatan dalam praktik politik. Distorsi Bahasa yang dilakukan pemerintahan Jokowi terhadap ideologi pancasila masyarakat Indonesia menimbulkan pertentangan. Jokowi menekankan pentingnya kepemimpinan disetiap kementerian, lembaga, hingga negara untuk memegang teguh ideologi pancasila. Jokowi mengajak semua pihak menampakkan rasa ideologi Pancasila dalam produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, hingga produk-produk perundangan. Tetapi dalam pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, pertentangan kebijakan pemerintah nya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu nya ialah terbitnya penghapusan Izin Mendirikan Bangunan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Berbanding terbalik dengan argumentasi pemerintah yang dinilai juga tidak menerapkan pancasila dalam mengelola negara. Lalu banyak pula terjadi pergeseran terhadap nilai-nilai pancasila di masyarakat.

Bahasa dan narasi Jokowi terhadap interpretasi Pancasila dalam pernyataan nya di setiap pidato mengenai Pancasila, masih bertentangan dengan kebijakan pemerintah nya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang seringkali menimbulkan suatu permasalahan. Banyak terjadi pergeseran terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Kekuasaan yang dilakukan pemerintahan nya dinilai berdampak negatif. Kekuasaan yang digunakan pemerintahan Joko Widodo ini bersifat *Position Power*, yang dimana Jokowi sebagai Presiden RI memiliki jabatan ketua maka telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan menteri atau anggota nya.

Kata Kunci : Interpretasi Pancasila, Distorsi Bahasa, Pemerintahan.

ABSTRACT

Language can give the wrong meaning if the meaning is not clear, its use cannot be limited, especially what often happens between the rulers and the people. In political practice in government, the existing philosophical values of Pancasila are deemed insufficient to have an assessment index to be implemented in the operationalization of rules in formulating government policy, in which the interpretation of Pancasila values is always different. As a result, Pancasila always loses its essential values, because every government regime always builds its own discourse about the essence of the meaning of Pancasila, which is adjusted to its political interests.

Language distortion is often an obstacle in political practice. The language distortion carried out by the Jokowi administration against the Pancasila ideology of the Indonesian people has caused conflict. Jokowi emphasized the importance of leadership in every ministry, institution, and state to uphold the Pancasila ideology. Jokowi invites all parties to show a sense of Pancasila ideology in policy products, regulatory products, and legislative products. But in a statement from the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, the conflict between his government policies that are not in line with Pancasila values creates a problem. One of them is the issuance of the abolition of building permits and environmental impact analysis by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Republic of Indonesia. It is inversely proportional to the government's argument which is also considered not to apply Pancasila in managing the country. Then there are many shifts towards Pancasila values in society.

Jokowi's language and narrative towards the interpretation of Pancasila in his statements in every speech on Pancasila, still contradicts his government's policies that are not in line with Pancasila values which often cause problems. There have been many shifts to the values of Pancasila in society. The power exercised by his government is considered to have a negative impact. The power used by the Joko Widodo administration is Position Power, where Jokowi as President of the Republic of Indonesia has the position of chairman then has the authority to regulate and direct ministers or members.

Keywords: Pancasila Interpretation, Language Distortion, Government.